

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2004) Akuntansi sektor publik adalah sebuah bentuk tanggungjawab dari pihak yang memegang amanah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang diberikan dari pemegang amanah. Sementara itu menurut sari dan blitar (2016) Akuntansi sektor publik adalah suatu entitas yang segala aktivitasnya berhubungan dengan publik yang digunakan untuk menghasilkan suatu pelayanan yang bersifat publik antara lain pelayanan, layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan transportasi publik, dan sebagainya. Akuntansi sector publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor public maupun swasta (Bastian,2010)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu

aktivitas yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi untuk organisasi sektor publik menurut Sari dan Blitar (2016) adalah :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber data yang menjadi wewenangnya
3. Memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) secara umum tujuan akuntansi pemerintah adalah memberikan dan menyajikan informasi pelaporan keuangan atas transaksi yang dilakukan pada periode tertentu. Tujuan khusus akuntansi pemerintah yang dijelaskan oleh Hasanah dan Fauzi (2017) antara lain :

1) Akuntabilitas

Kewajiban sektor publik dalam mempertanggungjawabkan,

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan

2) Manajerial

Akuntansi pemerintah membantu dalam penyusunan APBD dan strategi pembangunan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

3) Pengawasan

Keuangan di pemerintahan terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan manajerial atau operasional

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan pemerintah. Akuntansi sektor publik bertugas Dalam memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi dalam suatu periode tertentu adalah akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan.

2.1.1.3 Organisasi Sektor Publik

Bastian (2010) menjelaskan jenis organisasi sektor publik yang ada di Indonesia, yaitu organisasi pemerintah pusat, organisasi partai politik, organisasi LSM, organisasi yayasan, organisasi pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

Hertianti dan Nordiawan (2014) menyatakan jenis organisasi sector public terbagi menjadi tiga yaitu:

a) Instansi pemerintah

1. Pemerintah pusat, termasuk didalamnya: kementerian seperti departemen dalam negeri, departemen social, departemen keuangan, dan lain, lain.
2. pemerintah daerah termasuk didalamnya: satuan kerja perangkat daerah seperti dinas pendidikan,dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan lain-lain.

b) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Merupakan organisasi nirlaba milik pemerintah yang bentuknya bukan instansi pemerintah,

1. Rumah sakit milik pemerintah, seperti rumah sakit daerah
2. Yayasan-yayasan milik pemerintah

c) Organisasi Nirlaba Milik Swasta

1. Yayasan seperti sampoerna foundation
2. Sekolah dan universitas swasta
3. Rumah sakit milik swasta

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintahan memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan,

beban, asset hutang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Sementara itu, standar akuntansi pemerintah basis kas menuju akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Menurut Pangestu Dkk (2020) standar akuntansi pemerintahan merupakan aturan yang harus dipahami oleh sumber daya manusia yang menjadi dasar dalam melakukan pekerjaan agar output yang dihasilkan berkualitas. standar akuntansi pemerintah merupakan acuan yang digunakan sebagai dasar instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip atau aturaan yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan agar laporan keuangan berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

2.1.2.2 Tujuan Standar Akuntansi pemerintah

Ardhi dan Suhardjo (2013) menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan memiliki tujuan mengatur penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan perbandingan anggaran antar entitas maupun antar periode. Dengan ditetapkannya standar akuntansi pemerintah diharapkan akan dapat tercipta kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan pemerintah yang transparansi, partisipasi,

akuntabilitas serta memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan guna dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Ningtyas, 2015).

Dari berbagai teori diatas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan memiliki tujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan agar mencapai tata pengelolaan keuangan negara yang berkualitas sebab guna terciptanya tata pengelolaan keuangan negara yang transparansi dan akuntabel.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode tertentu.

Budiarto dan Indarti (2019) menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban yang dapat dipenuhi oleh pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah wajib memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah diberikan kepada

pihak yang berkepentingan guna untuk mengambil keputusan (Hartono dan Ramdany, 2020).

Menurut Leiwakabessy (2020) laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan dari laporan keuangan organisasi pemerintah daerah (OPD). Laporan keuangan pemerintah daerah umumnya meliputi laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga mencakup komponen seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan keluaran atau hasil dari kinerja dan tanggung jawab pengelola keuangan dalam periode tertentu (Apriansyah Dkk, 2020). Tujuan dan manfaat dari laporan keuangan pemerintah adalah sebagai informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Hal ini akan mempengaruhi apakah pengelolaan keuangan pemerintah sudah baik atau belum (Apriansyah Dkk, 2020).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri harus memiliki prinsip tepat waktu dan memiliki standar akuntansi mengenai suatu periode akuntansi bagi laporan posisi keuangan yang terstruktur dalam suatu

proses akuntansi sehingga standar akuntansinya berlaku bagi lapoan keuangan.

2.1.3.2 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas serta membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, social, maupun politik. Pelaporan keuangan pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang (moermahadi 2017):

- 1) Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan
- 2) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- 3) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- 4) Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencapai kebutuhan kasnya.
- 5) Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pengutusan pajak dan pinjaman
- 6) Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan menyajikan

keputusan yang ekonomis yang timbul karena melihat dampak keuangan pada informasi posisi keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan asset perusahaan yang sangat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan. Dalam konteks akuntansi sector public, jenis informasi yang diberikan untuk mengambil keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat finansial saja.

2.1.3.3 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat dan daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat/daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-masing selama periode tertentu .

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi tentang naik dan turunya saldo anggaran lebih tahun pelaporan dn dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi asset, kewajiban dan kekayaan pada akhir periode tertentu. Neraca

disusun menggunakan basis akrual yang artinya pengakuan atau pencatatan asset, kewajiban dan kekayaan dilakukan pada saat kewajiban/hak muncul meskipun kasnya belum diterima/dibayarkan.

4. Laporan Operasional

laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menyajikan informasi sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode pelaporan keuangan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penggunaan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus kas menjelaskan perubahan posisi kas di neraca, sehingga saldo akhir kas dineraca harus sama dengan saldo akhir kas menurut laporan arus kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos - pos laporan keuangan yang disajikan. Laporan tersebut disajikan supaya para pengguna laporan keuangan lebih mudah memahami .

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri atas tujuh jenis yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya yaitu berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

2.1.3.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik secara ekonomi, social maupun politik. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber daya keuangan/ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi LKPD sehingga bisa dikatakan berkualitas yaitu:

1) **Relevan**

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang dimuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa dimasa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

2) **Andal**

Informasi laporan keuangan bebas dari laporan keuangan yang mneyesatkan dan kesalahan material, menyajikan settiap fakta

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna .

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas menyajikan informasi yang jujur dan benar bagi pengguna laporan keuangan. Informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan harus dipersiapkan dengan baik, dan sudah disetujui audit secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan pada laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.4. Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mahmudi (2010) sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Sistem pengendalian yang diterapkan dalam lingkungan pemerintah bertujuan agar seluruh stakeholder memperoleh keyakinan bahwa pencapaian tujuan penyelenggara pemerintah telah terlaksana dengan baik dan berkualitas (Leiwakabessy, 2020).

Sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang memadai dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. sistem pengendalian pemerintah yang lemah dapat menghambat penilaian jika terjadi kecurangan dalam proses akuntansi yang dapat mengakibatkan data yang diperoleh menjadi tidak kompeten (Tawaqal dan Suparno, 2017).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan metode yang sudah terkordinasi untuk memberikann jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2 Tujuan dan komponen sistem pengendalian internal pemerintah

Tujuan sistem pengendalian pemerintah pada PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu:

- 1). Kegiatan yang efektif dan efisien
- 2). Laporan keuangan yang dapat diandalkan

3). Pengamanan asset

4). Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 bahwa unsur system pengendalian internal pemerintah mengacu pada unsur system pengendalian Internal yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai negara.

Menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyatakan Unsur-unsur pengendalian internal pemerintah meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus mampu menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Berbagai factor membentuk lingkungan penegndalian dalam suatu entitas (Indra, 2011) adalah :

- a) Nilai integritas dan etika, yaitu memelihara suasana etika organisasi untuk dijadikan teladan dan menghilangkan perilaku untuk melakukan tindakan yang tidak etis guna menegakkan kedisiplinan.
- b) Komitmen terhadap organisasi, yaitu menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah

- c) Filosofi dan gaya operasi manajemen, yaitu pimpinan instansi pemerintah harus memiliki sikap tanggap dan selalu mempertimnangkan resiko dalam pengambilan keputusan.
- d) Struktur organisasi, yaitu kerangka kerja bagi manajemen dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan organisasi
- e) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab yaitu satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada
- f) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia, yaitu penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari internal maupun eksternal.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah sudah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan

dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan reviu lainnya.

Sedangkan menurut Mulyadi (2008) unsur-unsur sistem pengendalian internal dibagi menjadi empat :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.5.1 Teknologi informasi

Menurut Mulyadi (2014) teknologi informasi mencakup komputer dan berbagai peralatan elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi. Teknologi informasi merupakan teknologi berupa komputer dan komunikasi yang digunakan untuk mengolah informasi (Nengsy, 2018). Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah, memperoleh, mengirimkan, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas (Pangestu Dkk, 2019).

Selain sebagai teknologi komputer,, teknologi informasi dapat membantu sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan mengumpulkan dokumen-dokumen untuk pembuatan laporan keuangan tersebut (Alamsyah,, 2017). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan public (Apriansyah dkk, 2020).

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi berupa komputer dan teknologi komunikasi yang berfungsi untuk membantu memudahkan, mengumpulkan, mengolah, dan memperoleh informasi secara berkualitas.

2.1.5.2 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kaukab dan Luhfiadi (2021) pemanfaatan teknologi informasi adalah tentang pengolahan data, pengolahan informasi, proses kerja, serta pengolahan manajemen secara elektronik untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja agar pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik. Selain berperan sebagai media elektronik, teknologi informasi memiliki fungsi untuk penyebaran informasi. Hal ini dapat membantu para pengguna dalam menyusun laporan keuangan serta mengumpulkan dokumen yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan.

Menurut (Friyani, 2020) teknologi informasi merupakan pemanfaatan computer elektronik untuk mengubah, menyimpan, melindungi, serta mendapatkan informasi secara aman. Ketika teknologi informasi diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi keuangan, sistem informasi akan mengumpulkan, memproses serta menyimpan data yang dapat dilakukan secara otomatis sehingga keakuratan dapat terjaga (Mutiana Dkk, 2017)

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat (Tampubolon dan Basid, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak positif bagi karyawan sehingga pemrosesan data yang

dilakukan semakin mudah. Menurut Agustina (2019) indikator dalam mengukur pemanfaatan teknologi adalah sebagai berikut:

1. Komputer
 - a. Penggunaan komputer, berupa penggunaan komputer dalam melakukan tugas pengolahan keuangan maupun non keuangan.
 - b. Pembuatan laporan keuangan terkomputerisasi, berupa penggunaan computer untuk melakukan proses akuntansi dari awal transaksi sampai pembuatan laporan keuangan.
 - c. Penggunaan software yang legal, yaitu berupa penggunaan software pengolahan data transaksi keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Jadwal pemeliharaan yang teratur, yaitu waktu yang digunakan untuk pemeliharaan, pendataan, dan perbaikan peralatan.
2. Jaringan Internet
 - a. Keberadaan jaringan, yaitu terpasang jaringan internet di unit kerja
 - b. Pemanfaatan jaringan internet, yaitu jaringan internet digunakan sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan.

2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Admaja dan Wahyundaru (2020) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi berfungsi memudahkan pengelolaan keuangan

agar instansinya lebih efektif dan efisien dalam menyallurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Manfaat penerapan teknologi menurut (Sutarman : 2012):

a) Kecepatan (speed)

Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik dan sangat cepat.

b) Konsistensi (consistency)

Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena formatnya sudah standar.

c) Ketepatan (precision)

Komputer dalam mengerjakan sesuatu lebih akurat dan tepat. Kompuer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.

d) Keandalan (reability)

Hasil kerja yang dihasilkan oleh komputer dapat dipercaya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi kemungkinan sangat kecil.

Berdasarkan uraian diatas data ditarik kesimpulan penerapan teknologi informasi memiliki manfaat yang sangat signifikan dan besar dalam membuat hasil kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi informasi memberikan hasil yang dapat dipercaya dibandingkan dengan hasil yang dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi kecil kemungkinan dan hasilnya lebih akurat.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.6.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Agustina Dkk (2020) menyatakan kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembuatan laporan keuangan, apabila terdapat hambatan pada kompetensi sumber daya manusia, maka akan mempengaruhi proses pengelolaan data. Sumber daya yang terlibat dalam hasil informasi keuangan wajib memiliki tingkat keahlian dan mempertahankan keahlian tersebut agar tingkat informasi keuangan tetap terjaga kualitasnya (Hartono dan Ramdany, 2020).

Febriady (2013) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan elemen penting bagi lembaga maupun organisasi, oleh karena itu dipastikan sumber daya manusia dilakukan dengan baik dapat memberikan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, pelatihan, dan memiliki kemampuan dalam bidang keuangan. sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang bisa memahami dan menerapkan logika akuntansi dengan baik dalam sistem akuntansi (Wardani dan Andriyani, 2017). Menurut Wardani dan Andriyani (2017) indikator dalam variabel ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan

Kesadaran dalam bidang kognitif. Mengetahui cara melakukan identifikasi dan melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan

2. Kemampuan Individu

Sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.

3. Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan

Memaparkan dengan jelas peran dan fungsi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan.

4. Memahami prosedur dan proses akuntansi

Sumber daya manusia harus memahami dan memiliki pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.

2.1.6.3 Manfaat Kompetensi Sumber Daya Manusia

Wardani dan Andriyani (2017) menyatakan Kompetensi sumber daya manusia merupakan factor penting dalam keberhasilan suatu entitas. Sumber daya manusia memiliki pran perencanaan dan pelaksanaan dalam entitas yang bersangkutan. Jika kompetensi sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan berkualitas. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia bertugas agar penyelenggara tugas dan fungsi organisasi ddalam rangka menghasilkan laporan keuangan dapat terlaksana dengan baik (Wati 2014).

Menurut Rahayu (2018) sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan penyusunan laporan keuangan agar

tersaji dengan baik. Kualitas dan kompetensi staff akuntansi merupakan salah satu factor penting dalam hal penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan (Ramadhani, 2018). Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kualitas yang dimiliki staff akuntansi maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak bisa memiliki informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan (Ramadhani, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian peneliti mengambil beberapa referensi dari jurnal terdahulu yaitu:

Table 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

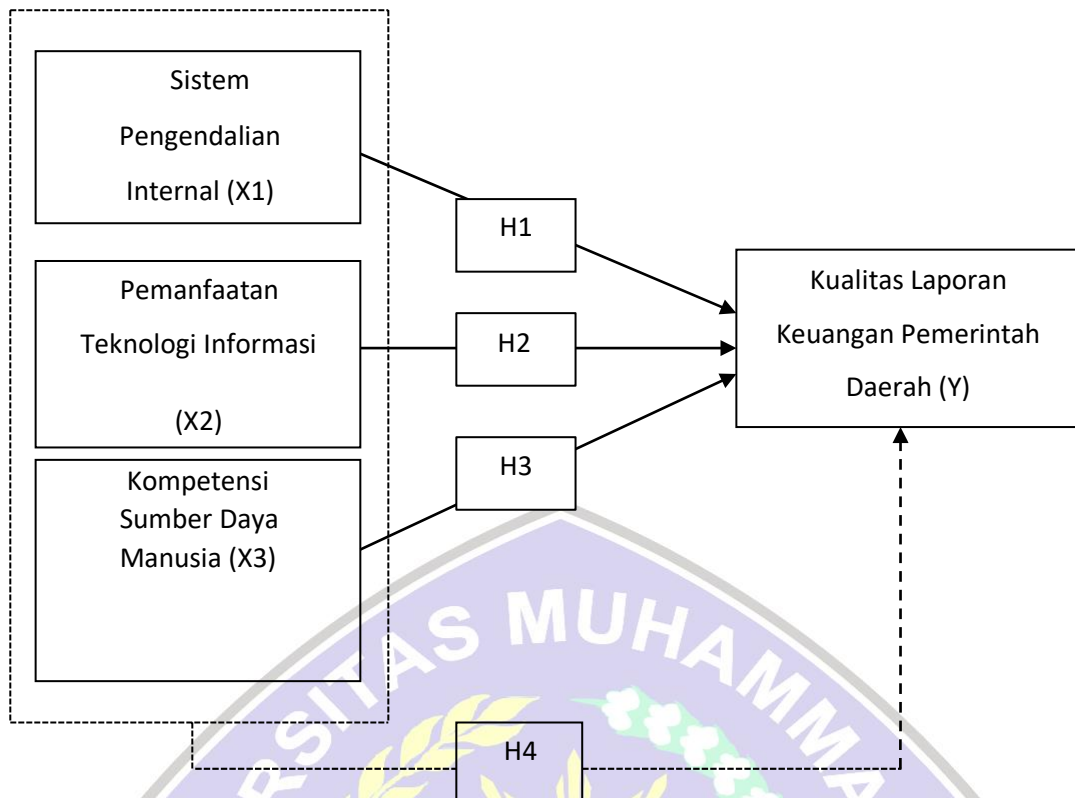
No	Nama dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Suryaningsih, M (2019)	Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, Kualitas laporan keuangan	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan system pengendalian intern pemerintah berpengaruh padaa kualitas laporan keuangan rumah sakit Dr.cipto mangunkusuma
2	Faishol, A. (2016)	Sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan	Hasil pelitian menunjukkan bahwa system pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Kedua variable memiliki pengaruh yang simultan
3	Hartono, H & Ramdany, R. (2020)	Standart akuntansi pemerintahan ,Pengendalian Intern , Kualitas laporan	Hasil penelitian yang di olah dengan model analisis regresi berganda menunjukkan bahwa standart akuntansi pemerintahan,

		keuangan	pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4	Tawaqal, I., & Suparno, S.	Penerapan sistem informasi akuntansi ,Sistem pengendalian internal,Kompetensi sumber daya manusia,kualitas laporan keuangan	Dari hasil analisa dapat di peroleh hasil bahwa penerapan informasi akuntansi dan system pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ketiga variable dependen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variable kualitas laporan keuangan Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variable independen lain agar dapat di ketahui bahwa laporan keuangan SKPD dapat di pengaruhi oleh variable lainnya.
5	Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020)	System pengndalian internal,Kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian yang dilakukan dengan meode perhitungan analisis data atas tanggapan responden, uji validitas dan reabilitas,koefisien korelasi Rank Speman, regresi linier sederhana dan korelasi determinasi menunjukkan bahwa system pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber : Ringkasan penelitian diolah tahun 2021

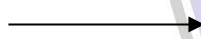
2.3 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan , pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan.

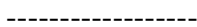


Gambar 1 Kerangka Berfikir

Keterangan:



: pengaruh secara parsial



: pengaruh secara simultan

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat di jelaskan bahwa penelitian ini memiliki tiga variabel independen atau variabel yang mempengaruhi yaitu kualitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), sistem pengendalian internal (X3). Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel yang terpengaruhi dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan(Y). Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y.

Untuk mengetahui tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdapat beberapa factor yang memengaruhi diantaranya sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia. Faktor- faktor tersebut dapat menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik maka akan tercapai laporan keuangan yang berkualitas. Penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan komputer juga akan mempermudah dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan. Seluruh pegawai yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka kualitas laporan keuangan dapat tercapai sebab laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi yang layak untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan.

2.4 Hipotesis

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Sistem pengendalian internal menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, karena pencatatan laporan keuangan yang akurat dan terkontrol membutuhkan sistem pengendalian internal yang baik (Mutiana Dkk, 2017).Tawaqal dan suparno (2017) mengatakan keefektifan sistem pengendalian internal sangat diperlukan untuk proses perencanaan dan pelaporan Sistem pengendalian internal mempunyai fungsi sebagai sumber informasi independen serta faktor penting yang digunakan dalam meningkatkan laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di pengaruhi oleh seberapa baik system pengendalian internal yang di miliki. Lemahnya sistem pengendalian internal yang ada

dapat menimbulkan sulitnya mengetahui kecurangan tentang bukti audit yang di peroleh dari data akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Sinambela (2020) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lestari (2015) dan ramdany (2017) memiliki hasil yang sama yaitu keefektifan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nilamsari Dkk, 2020) menyatakan bahwa system pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis pertama yaitu:

Ho1 : Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Ha1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

Tampubolon dan Basid (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah pengelolaan dan menyalurkan informasi keuangan secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan oleh sumber daya manusia dalam proses pembuatan laporan keuangan untuk membantu mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data,

sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal (Wardani dan Andriyani, 2017). Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatan yang luas, dapat memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendahaygunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat (Fathia Dkk, 2020). Dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi pemerintah daerah wajib untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan public. Selain itu peningkatan web juga menjadi tanggung jawab pemerintah guna memudahkan masyarakat luas untuk mengetahui informasi mengenai pemerintah seperti kinerja, progam maupun kebijaka baru yang berkaitan dengan instansi pemerintah (Putri Dkk, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Yosefrinaldi yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri Dkk, 2020) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tida berpengaruh secara signifikan terhadap kualitaas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis kedua sebagai berikut :

Ho2 : Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Ha2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

Menurut Hartono dan Ramdany (2020) hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan berbanding searah. Sumber daya manusia yang keahliannya memadai dapat menjaga tingkat informasi kualitas laporan keuangan. Putri Dkk (2020) menyatakan kompetensi Sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengartikan bahwa karyawan yang tidak berkompeten ataupun berkompeten tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sebab laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang dibuat oleh pemerintah dan menggunakan software yang sama yang sudah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartono dan Ramdany, 2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kementrian kelautan dan perikanan. Sejalan dengan penelitian tersebut hasil penelitian yang dilakukan (Yensi, 2014) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Kuantan singingi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Handayani (2017) yang menyatakan bahwa

kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

Ho3 : Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ponorogo

Ha3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ponorogo

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Keefektifan sistem pengendalian internal di perlukan untuk membantu aktivitas organisasi dalam pengambilan keputusan yang obyektif dan akuntabel. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga berperan penting dalam ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan proses pengolahan datanya. Semakin baik tingkat teknologi yang di gunakan, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin berkualitas (Tampubolon dan Basid, 2019). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan individu dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang baik, maka dapat menghemat waktu pembuatan pelaporan keuangan (Apriansyah, 2020). sumber daya yang kompeten sangat di butuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Tawaqal dan Suparno, 2017).

Faishol (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. hal ini di dukung oleh penelitian yang di lakukan Firdaus Dkk (2015) menjelaskan bawa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. penelitian Faishol (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah adanya pengaruh positif antarsistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Ho4 : Sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Ha4 : Sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.